



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AYU KUSUMA NURHARJANTI**
2. Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN**
3. NHK : **255824**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.587.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 289 m²/180 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000
2. Tanah Seluas 6200 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 957.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 196.500.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1984, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
4. MOTOR, HONDA NC12A1CBF SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
5. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
6. MOBIL, FORD MINI MPV Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 75.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.900.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 146.146.255**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.965.546.255



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.965.546.255

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.